



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Laporan Kinerja yang diharapkan tidak hanya kinerja pemerintah kepada masyarakat tetapi juga kinerja BPPDRD (Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah) Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPPDRD Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKJIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017.

BPPDRD Kota Balikpapan merupakan salah satu OPD Pemerintah Kota Balikpapan yang menangani urusan Pemerintah mengenai Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah dan retribusi daerah yang mana telah banyak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah, Kota Balikpapan telah dan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Balikpapan tahun 2017 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2017. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2017.

Balikpapan, Desember 2017

Kepala BPPDRD
Kota Balikpapan,

Drs. MUHAMMAD NOOR
NIP. 19611102 198701 1 001



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. ASPEK STRATEGIS	5
D. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI	5
E. STRUKTUR ORGANISASI	7
F. SUMBER DAYA MANUSIA	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	8
1. VISI DAN MISI	8
2. TUJUAN DAN SASARAN	8
3. INDIKATOR KINERJA	8
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	9
5. PROGRAM / KEGIATAN	10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORAGANISASI	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. PENCAPAIAN KINERJA	19
D. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	19
A. KESIMPULAN	19
B. SARAN	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pengembangan aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan dukungan administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam suatu sistem administrasi Negara yang makin handal, profesional dan strategis.

Dalam merespon perubahan lingkungan strategis di setiap instansi pemerintah termasuk BPPDRD Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

BPPDRD melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.



2. Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sa-h sesuai kewenangannya;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutandan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS

1. Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur;
4. Terciptanya Pelaynan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.



D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI

Adapun isu strategis yang dihadapi adalah perlunya :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perpajakan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah yang aspiratif, Transparan dan akuntabel;
3. Menggali Potensi dan sumber- sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah Serta Akurasi data Potensi Penerimaan Pajak daerah;
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Balikpapan;
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada masyarakat Kota Balikpapan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 maka susunan Organisasi BPPDRD Kota Balikpapan membawahkan :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan :

- a. Ka. Subbid Pendataan;
- b. Ka. Subbid Pendaftaran; dan
- c. Ka. Subbid Pemeriksaan dan Penetapan.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan :

- a. Ka. Subbid Pendataan dan Penilaian PBB-P2;
- b. Ka. Subbid BPHTB; Dan
- c. Ka. Subbid Data dan Informasi.



5. Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan:

- Ka. Subbid Penagihan;
- Ka. Subbid Layanan Keberatan; dan
- Ka. Subbid Pembukuan.

6. Bidang Pengendalian Operasional membawahkan :

- Ka. Subbid Perencanaan;
- Ka. Subbid Pengembangan Potensi; dan
- Ka. Subbid Pengendalian Operasional.

6. Unit Pelaksana Teknis

7. Kelompok Jabatan Fungsional

F. SUMBER DAYA MANUSIA

BPPDRD Kota Balikpapan per 31 Desember 2017 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak **114 (Seratus Empat Belas)** orang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	3 Orang
2	Sarjana (S-1)	30 Orang
3	Diploma IV (D4)	3 Orang
4	Diploma III (D3)	11 Orang
5	Diploma II (D2)	~
6	Diploma I (D1)	5 Orang
7	SLTA	55 Orang
8	SLTP	2 Orang
9	SD	2 Orang
JUMLAH		111 Orang

Tabel 1.2 Data Pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	PNS	55 orang	22 orang
2	THL	5 orang	-
3	NABAN	16 Orang	13 Orang



Tabel. 1.3. Data Pegawai BPPDRD Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 orang
2	Golongan III	30 orang
3	Golongan II	40 orang
4	Golongan I	1 orang
5	THL	5 orang
6	NABAN	29 orang
Jumlah		111 Orang



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang dibuat untuk rentang 5 tahun seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004 yang berisi mengenai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program-program yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 dalam pelaksanaan Renstra 2016-2021 yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Visi dan Misi berikut.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Visi BPPDRD Kota Balikpapan adalah :

***“MENJADI PERANGKAT DAERAH YANG PROFESSIONAL
DALAM MENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”***

Misi untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok maka ditetapkanlah misi BPPDRD Kota Balikpapan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;**
- 4. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat.**

2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi



yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1 : Tujuan BPPDRD Kota Balikpapan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi daerah	- Presentase Kenaikan Pajak Daerah - Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak) - Presentase Kenaikan Retribusi daerah
3	Mewujudkan aparatur yang berkopeten dibidangnya	Tingkat Kualitas aparatur
4	Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2. Sasaran BPPDRD Kota Balikpapan

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan
2	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah	- Presentase Kenaikan Pajak Daerah - Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak) - Presentase Kenaikan Retribusi daerah



3	Meningkatnya kemampuan aparat	Tingkat Kualitas aparat
4	Terciptanya Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama BPPDRD
Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan	Program Peninjauan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Pajak Daerah		382,6 M	757,800,000	396 M	833,580,000	409,9 M	916,938,000	424,3 M	1,008,631,800	439,2 M	1,109,494,980	454,6 M	1,220,444,478		
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)																	
	Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah			Peningkatan Wajib Pajak Daerah	WP	16528	844,426,500	330	928,869,150	330	975,312,608	330	1,024,078,238	330	1,075,282,150	330	1,129,046,257	
	Presentase Kenaikan Retribusi Daerah	Peningkatan Objek PBB-P2	OP	144403	1,820,193,000	720	2,002,212,300	500	2,102,322,915	500	2,207,439,061	500	2,317,811,014	500	2,433,701,564			
Meningkatkan Kemampuan Aparatur	Tingkat Kualitas Aparatur	Program Peninjauan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	Orang	52	1,094,980,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000		
Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat																	



4. Strategi Dan Kebijakan

Strategi menjelaskan pemikiran – pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya – upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Strategi BPPDRD Kota Balikpapan adalah :

- a. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan efektifitas operasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Memberlakukan Pembayaran secara *on-line*;
- d. Mengintensifkan penagihan terhadap WP/RD;
- e. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat/ Wajib Pajak akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan kota;
- f. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai;
- g. Penyempurnaan Produk Hukum Daerah terkait pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Penyempurnaan Sistem, Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
- i. Mewujudkan dan memenuhi Standar Pelayanan.

Kebijakan BPPDRD dalam melaksanakan fungsinya melakukan kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan operasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Wajib Pajak;
- d. Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Pajak dan Tagihan WP/RD;
- e. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib pajak secara bertahap dan berkesinambungan;



- f. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai Tentang perpajakan;
- g. Optimalisasi peran salah satu Bidang untuk sosialisasi kepada aparaturnya;
- h. Penyempurnaan produk hukum Daerah Terkait pajak daerah dan retribusi daerah ;
- i. Penyempurnaan System, Tata kerja dan Hubungan kerja;
- j. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala;
- k. Monitoring dan Evaluasi hasil Survey
- l. Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal.

5. Program / Kegiatan BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2017

BPPDRD di Tahun 2017 Melakukan 4 (Empat) Program dan 21 (Dua puluh satu) Kegiatan dengan Rincian sebagai Berikut :

KODE		URAIAN	JUMLAH (Rp)	
PROG RAM	KEGIA TAN		ANGGARAN MURNI	SETELAH PERUBAHAN
01.		Program Pelayanan administrasi Perkantoran		2,217,962,000.00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	104,420,000.00	104,420,000.00
	006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	65,000,000.00	65,000,000.00
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20,597,600.00	20,597,600.00
	010.	Penyediaan alat Tulis Kantor	190,035,900.00	279,466,900.00
	011.	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	469,561,000.00	582,121,000.00
	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	150,000,000.00	104,845,000.00
	018.	Rapat- rapat Koordinasi, Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah	300,000,000.00	400,000,000.00
	019.	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran	661,511,500.00	661,511,500.00
02.		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		253,111,000.00
	024.	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	180,761,000.00	180,761,000.00
	028.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	125,000,000.00	72,350,000.00
17.		Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah		2,355,312,000.00
	049.	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	1,011,760,000.00	861,760,000.00
	050.	Pengumpulan data Penghapusan Piutang PBB-P2	50,000,000.00	39,400,000.00
	051.	Penerbitan dan pendistribusian SPJT PBB-P2	59,990,000.00	59,990,000.00



	052.	Operasional SIMPATDA Pajak daerah	327,750,000.00	412,525,000.00
	053.	sarana pendukung kegiatan PBB-P2	34,500,000.00	34,500,000.00
	054.	Updating data PBB-P2	91,660,000.00	-
		Pengembangan aplikasi pajak daerah	-	300,000,000.00
	055.	Operasional Pelayanan pajak daerah	87,045,000.00	-
	056.	Operasional Pelaynan PBB-P2 dan BPHTB	85,760,000.00	-
	057.	Operasi sisir dan pengawasan objek pajak daerah	446,991,000.00	416,511,000.00
	130.	kajian Produk Hukum Pajak daerah dan retribusi daerah kota Balikpapan (realokasi)	230,626,000.00	230,626,000.00
23.		Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi		563,140,000.00
	006.	Operasional Alikasi payment Online	376,340,000.00	563,140,000.00
JUMLAH			5,069,309,000.00	5,389,525,000.00

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Yang ingin dicapai BPPDRD Kota Balikpapan tahun 2017 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan 2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya Akuntanbilas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	~ Penilaian Opini Laporan Keuangan	WTP
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	~ Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	9.52%
		~ Persentase penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)	81.00%
		~ Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	2.35%
3	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	~ Tingkat Kualitas Aparatur	81.0%
4	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang prima	~ Indeks Kepuasan Masyarakat	79,55 (Baik)



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan	WTP
2.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah 2. Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	9.52% 2.35%
3.	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	Tingkat Kualitas Aparatur	85.0%
4.	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,55 (Baik)

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,961,126,000.00	APBD
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	305,761,000.00	APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2,426,082,000.00	APBD
4.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	376,340,000.00	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang dilanjutkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja 2017.

BPPDRD Kota Balikpapan pada tahun 2017 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 sasaran dengan 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan secara umum dapat dicapai dengan baik.

Pencapaian sasaran BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Pencapaian sasaran BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir RENSTRA (2017)	Capaian s.d 2017 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/7)*100
1.	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang P2O</i>	382.567.098.263,00	419.000.000.000,00	450.464.841.677,55	107,51%	419.000.000.000,00	107%
2.	Jumlah Wajib Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang PBB-P2 dan BPHTB</i>	219.242	223.637	223.589	100%	223.637	99%
3.	Jumlah Sumber – sumber Pendapatan Daerah	22 Kegiatan	21 Kegiatan	18 Kegiatan	85%	25	72%
4.	Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak <i>Sumber data : Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan</i>	Baik	75 (Baik)	79.55 (Baik)	106%	75 (Baik)	106%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

BPPDRD Kota Balikpapan sebagai salah satu penyokong pendapatan tentu memiliki target sebagai dasar realisasi pencapaian sehingga dapat diukur hasil kinerja dari BPPDRD Kota Balikpapan di tahun 2017. Adapun target dan realisasi berdasarkan sasaran strategis BPPDRD Kota Balikpapan di tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Tahun 2017

Sasaran Strategis : Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang P2O</i>	419.000.000.000,00	450.464.841.677,55	107,51
Jumlah Wajib Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang PBB-P2 dan BPHTB</i>	223.637 Wajib Pajak	223.589 Wajib Pajak	99
Sasaran Strategis : Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Sumber – Sumber Pendapatan Daerah	21 Kegiatan	18 Kegiatan	72
Sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak <i>Sumber data : Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan</i>	75	79.55	106

Dari table 3.2 di atas dapat diketahui bahwa tiga dari target yang telah ditetapkan BPPDRD Kota Balikpapan telah tercapai bahkan melampaui target sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah yang tercapai 100% dari 18 kegiatan yang seharusnya 21 Kegiatan dikarenakan adanya Rasionalisasi anggaran akibat defisit anggaran. Mengakibatkan ada 3 Kegiatan di BPPDRD yang dirasionalisasikan, yang melanda diberbagai Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia khususnya Pemerintah Kota Balikpapan. Meskipun demikian BPPDRD Kota Balikpapan tetap melaksanakan 18 Kegiatan dan capaiannya 72 %, Adapun tercapainya target jumlah pendapatan pajak dan jumlah wajib pajak merupakan hasil dari kegiatan Operasi Sisir Pajak Daerah serta dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pada tabel 3.3 berikut ini dapat dilihat perbandingan kinerja BPPDRD Kota Balikpapan dengan tahun sebelumnya.



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi 2017 dengan Realisasi 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1.	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang P2O</i>		382.567.098.263	403.690.047.708,65	450.464.841.677,55
2.	Jumlah Wajib Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang PBB-P2 dan BPHTB</i>	Wajib Pajak	223.637 Wajib Pajak	219.242 Wajib Pajak	223.589 Wajib Pajak
3.	Jumlah Sumber – Sumber Pendapatan Daerah	Kegiatan	21 Kegiatan	22 Kegiatan	18 Kegiatan
4.	Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak <i>Sumber data : Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan</i>		75 (Baik)	Baik	79.55 (Baik)

Tabel 3.3 menggambarkan hasil pencapaian target tahun 2017 dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang mana capaian tahun 2017 lebih tinggi dari pada capaian pada tahun 2016, meskipun Pemerintah Kota Balikpapan Mengalami deficit anggaran dan rasionalisasi Kegiatan di tahun 2017 BPPDRD tetap melakukan Kegiatan Untuk Tercapainya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Tahun 2017 serta menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan atau kepuasan masyarakat wajib pajak dalam pelayanan Pajak Daerah.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir RPJMD/RENSTRA 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
1.	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang P2O</i>		419.000.000.000,00	450.464.841.677,55	93%
2.	Jumlah Wajib Pajak Daerah <i>Sumber data : Bidang P2O dan Bidang PBB-P2 dan BPHTB</i>	Wajib Pajak	223.637	223.589	100%
3.	Jumlah Sumber – Sumber Pendapatan Daerah	Kegiatan	25	18	138%
4.	Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak <i>Sumber data : Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan</i>		75 (Baik)	79.55 (Baik)	106%



Pada tabel 3.4 menerangkan mengenai pencapaian BPPDRD tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD/RENSTRA. Pencapaian Jumlah Pendapatan pajak Daerah 93% lebih tinggi dari target di RPJMD/RENSTRA, sedangkan Jumlah Wajib Pajak Daerah adalah 100%, jumlah kegiatan yang menjadi sumber pendapatan daerah hanya mencapai 138%, meskipun adanya perampingan/ rasionalisasi kegiatan di tahun 2017 tingkat pencapaian realisasi tetap melampaui. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak mencapai 106% dari target akhir.

Tabel 3.5 Tingkat efisiensi dari Capaian Kinerja dengan penyerapan Anggaran Murni

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	17,51%	93%	1.8
		Jumlah Wajib Pajak Daerah	100%	99%	1.01
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak	106%	25%	4.29

Tabel 3.6 Tingkat efisiensi dari Capaian Kinerja dengan penyerapan Anggaran Perubahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	17,51%	93%	1.8
		Jumlah Wajib Pajak Daerah	100%	99%	1.01
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak	106%	100%	1.06

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian kegiatan BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2017 dialokasikan dan Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal.



Anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Adapun besarnya anggaran yang tertuang tersebut adalah :

Rencana Kerja Anggaran (RKA) :

- 1. Belanja Tidak Langsung : **Rp. 31.576.930.000,00**
- 2. Belanja Langsung : **Rp. 5.389.525.000,00**

Realisasi Anggaran tersebut masing-masing :

- 1. Belanja Tidak Langsung : **Rp. 28.308.277.783,75**
- 2. Belanja Langsung : **Rp. 4.921.935.018,00**

Jumlah Belanja Langsung yang terealisasi sebesar 109% dari total Dana Belanja Langsung dilihat dari tertib administrasi, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada triwulan ke -3 dan ke-4. Pada tabel 3.7 berikut ini dapat dilihat capaian keuangan tiap kegiatan yang masuk dalam sasaran kinerja BPPDRD Kota Balikpapan.

Tabel 3.7 Capaian Keuangan Tahun 2017

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi s/d DESEMBER					
			Total		BLP		BLNP	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.1.01.1..001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,217,962,000.00	2,085,417,847.00	94.02	643,246,500.00	29.00	1,442,171,347.00	65.02
001.0002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104,420,000.00	94,585,120.00	90.58	0.00	0.00	94,585,120.00	90.58
001.0006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65,000,000.00	21,633,800.00	33.28	0.00	0.00	21,633,800.00	33.28
001.0008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,597,600.00	16,890,500.00	82.00	0.00	0.00	16,890,500.00	82.00
001.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	279,466,900.00	268,681,050.00	96.14	0.00	0.00	268,681,050.00	96.14
001.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	582,121,000.00	573,848,002.00	98.58	0.00	0.00	573,848,002.00	98.58
001.017.	Penyediaan makanan dan minuman	104,845,000.00	70,083,000.00	66.84	0.00	0.00	70,083,000.00	66.84
001.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	400,000,000.00	396,449,875.00	99.11	0.00	0.00	396,449,875.00	99.11
001.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	661,511,500.00	643,246,500.00	97.24	643,246,500.00	97.24	--	0.00
0.1.01.1..002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	253,111,000.00	196,818,591.00	77.76	0.00	0.00	196,818,591.00	77.76
002.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180,761,000.00	134,008,591.00	74.14	0.00	0.00	134,008,591.00	74.14
002.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72,350,000.00	62,810,000.00	86.81	0.00	0.00	62,810,000.00	86.81
0.3.00.03..17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,355,312,000.00	2,119,551,300.00	89.99	719,202,000.00	30.54	1,400,349,300.00	59.45
17.049.	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	861,760,000.00	786,907,500.00	91.31	719,202,000.00	83.46	67,705,500.00	7.86
17.050.	Pengumpulan Data Penghapusan piutang PBB-P2	39,400,000.00	24,632,500.00	62.52	0.00	0.00	24,632,500.00	62.52
17.051.	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	59,990,000.00	59,795,000.00	99.67	0.00	0.00	59,795,000.00	99.67
17.052.	Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	412,525,000.00	371,341,000.00	90.02	0.00	0.00	371,341,000.00	90.02



17.053.	Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	34,500,000.00	34,499,300.00	100.00	0.00	0.00	34,499,300.00	100.00
17.054.	Updating Data PBB-P2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
17.055.	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
17.056.	Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
17.057.	Operasi Sisir dan Pengawan Objek Pajak Daerah	416,511,000.00	313,650,000.00	75.30	0.00	0.00	313,650,000.00	75.30
17.130.	Kajian Produk Hukum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan (Realokasi)	230,626,000.00	230,626,000.00	100.00	0.00	0.00	230,626,000.00	100.00
17.131.	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah	300,000,000.00	298,100,000.00	99.37	0.00	0.00	298,100,000.00	99.37
0.1.02.10..23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	563,140,000.00	518,874,280.00	92.14	0.00	0.00	518,874,280.00	92.14
23.0006.	Operasional Aplikasi Payment Online	563,140,000.00	518,874,280.00	92.14	0.00	0.00	518,874,280.00	92.14
Total		5,389,525,000.00	4,920,662,018.00	91.30	1,362,448,500.00	25.28	3,558,213,518.00	66.02



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPPDRD Kota Balikpapan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017. LKJIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kota Balikpapan.

Dari 4 (Empat) sasaran di tahun 2017, secara umum ketiga sasaran tersebut telah tercapai dengan baik. Untuk Indikator pencapaian sasaran yang belum tercapai 100%, di masa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran BPPDRD Kota Balikpapan, dukungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi terkait serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan.

Namun di samping keberhasilan yang telah dimiliki oleh BPPDRD Kota Balikpapan tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala – kendala yang ada, diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai ;
2. SDM ;
 - a. Belum Optimal Pendidikan dan Pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme;
 - b. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BPPDRD Kota Balikpapan.

B. SARAN

Upaya yang dilakukan BPPDRD Kota Balikpapan dalam menghadapi kendala – kendala yang ada :

- a. Meningkatkan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM;



- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui workshop, sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan elektronik;
- c. Mengadakan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan;
- d. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas / Unit Kerja terkait dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara optimal;
- e. Penungguan dan Peninjauan Lapangan ke Objek Pajak;
- f. Melakukan monitoring / penagihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak yang belum membayar / melunasi pajak daerah;
- g. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan angsuran;
- h. Menggali Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good and Clean Goverment* yang melibatkan *stake holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

“ Balikpapan Ku Bangun, Ku Jaga dan Ku Bela, Ku Bangun dengan Amal, Ku Jaga dengan Iman dan Ku Bela dengan Doa “.

Balikpapan, Desember 2017
Kepala BPPDRD
Kota Balikpapan

Drs. MUHAMMAD NOOR
NIP. 19611102 198701 1 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Ahdiansyah	Sekretaris	
2	Ririn Trisnawati, S.STP	Kasubbag. Program	